

MOTIVASI AUSTRALIA IKUT DALAM PEMBENTUKAN *REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP* (RCEP)

Oleh : Zikra Nurmala

Pembimbing : Drs. Syafri Harto, MSi

**Bibliography : 13 Jurnal dan Paper Ilmiah, 11 Buku, 2 Skripsi, 25 Website,
3 Dokumen Penting**

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional-Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28294
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This research aim to analyze the Australia's Interest in the Regional Comprehensive Economic Partnership both political and economic interest on it. Regional Comprehensive Economic Partnership is a form of free trade agreement comprising 10 ASEAN countries and 6 ASEAN FTA partners.

The data used in this study is a secondary data. Secondary data was obtained trough library research and search online media research. The writer used liberalism perspective and State level of analysis as a reference to analyze the interest of Australia in the Regional Comprehensive Economic Partnership. This study also uses the theory of National Interest related to the Australia interest.

The result of this research is the Australia aim to improve the political economy of Australia trough integrating the cooperations between Australia and another Regional Comprehensive Economic Partnership countries that already exist to minimalize the barrier in order to achieve the National Interest of Australia and maximazing the opportunity.

Keywords : Regional Comprehensive Economic Partnership, Australia Interest, Political Economy.

I. PENDAHULUAN

Sejak Perang Dunia II, globalisasi ekonomi dunia berkembang dengan pesat. Hal ini dimungkinkan oleh peningkatan kegiatan ekonomi, khususnya, dalam perdagangan internasional dan investasi langsung asing (*foreign direct investment / FDI*). Laju globalisasi dipercepat oleh perundingan perdagangan multilateral mengenai Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan (GATT); liberalisasi perdagangan dan investasi; deregulasi dan privatisasi industri nasional; dan semakin murah biaya perdagangan luar negeri dari teknologi perkembangan telekomunikasi dan transportasi.

Dalam dua dekade terakhir, sistem perdagangan di kawasan Asia Pasifik telah berkembang pesat berubah Sebelum tahun 2000an, liberalisasi perdagangan sebagian besar terjadi di bawah naungan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), badan multilateral yang memberlakukan serangkaian peraturan perdagangan yang mengikatatas semua anggotanya Namun, dalam 15 tahun terakhir ini, sejumlah pemerintah di Asia-Pasifik telah beralih ke FTA - bilateral dan plurilateral (yaitu melibatkan lebih dari dua negara bagian)kesepakatan yang melampaui peraturan WTO untuk secara khusus mengurangi hambatan untuk berdagang antara penandatanganan negara. Pada tahun 2000, hanya ada tiga perjanjian perdagangan yang berlaku di Asia Pasifik, namun pada tahun 2014, jumlah

kesepakatan perdagangan regional yang dilaporkan ke WTO naik menjadi 40. Apalagi jika perjanjian diluar WTO yang masih dalam pemberitahuan dan di bawah kesepakatan negosiasi disertakan, penghitungan inisiatif FTA antara Asia-Negara Pasifik naik menjadi 71. Sebagai hasilnya, kawasan ini telah menjadi salah satu situs paling aktif untuk FTA negosiasi secara global.¹

Dilihat dari sistem perdagangan regional di Asia Pasifik yang sedang berada di persimpangan jalan. Setelah menegosiasikan serangkaian perjanjian perdagangan bebas bilateral (FTAs) selama tahun 2000an, banyak pemerintah sekarang mulai melihat kesepakatan perdagangan "mega-regional" baru. Pada bulan Maret 2010, negosiasi untuk *Trans-Pacific Partnership* (TPP) secara resmi dimulai - sebuah kesepakatan yang dipimpin oleh AS yang terdiri dari 12 anggota dari seluruh wilayah Asia Pasifik. Ini segera diikuti oleh Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) yang diumumkan pada bulan Mei 2013 - sebuah kesepakatan yang berpusat pada ASEAN dan enam negara yang memiliki FTA plurilateral.² Jelas adanya kerjasama-kerjasama regional ini muncul atas tuntutan suatu negara untuk memperluas perdagangannya guna meningkatkan perekonomian negara. Saling ketergantungan antara negara-negara di kawasan Asia Pasifik dan proses integrasi ekonomi yang sedang berlangsung di kawasan ini telah membawa pada kesadaran yang lebih besar akan kebutuhan

¹ Xiao, Yifei. 2015. Competitive Mega-regional Trade Agreements: Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) vs. Trans-Pasific Partnership (TPP). CUREJ-College Undergraduate Research Electronic Journal. Hlm 6.

² Jeffrey D. Wilson. 2015. Mega-Regional Trade Deals in the Asia-Pacific: Choosing Between the TPP and RCEP. *Journal of Contemporary Asia*. Vol. 45, No. 2, Hlm 345.

akan konsultasi, kerjasama dan koordinasi kebijakan, tidak hanya di bidang ekonomi tetapi juga di bidang politik .

Australia memiliki pasar yang sangat terbuka dengan batasan minimal atas impor barang dan jasa. Hal ini telah meningkatkan produktivitas, merangsang pertumbuhan dan membuat ekonomi lebih fleksibel dan dinamis. Australia telah mengembangkan keunggulan kompetitif dalam berbagai barang dan jasa, mulai dari produk teknologi tinggi seperti peralatan medis dan ilmiah sampai dengan anggur berkualitas tinggi dan makanan olahan. Ekspor jasa utama meliputi pendidikan dan pariwisata, dan layanan profesional dan keuangan. Layanan oleh perusahaan Australia yang beroperasi di luar negeri memberikan kontribusi besar bagi perekonomian Australia.

Australia terus mendorong liberalisasi perdagangan - secara sepihak, bilateral dan multilateral. Ini akan memperkuat kerjasama ekonomi internasional, mengurangi risiko yang dihadapi ekonomi global, dan mendorong pertumbuhan. Australia memainkan peran aktif dalam forum WTO, APEC, G20 dan forum perdagangan lainnya. Australia juga telah menegosiasikan perjanjian perdagangan bilateral dan regional dengan berbagai negara untuk memperkuat arus perdagangan dan investasi. Australia memiliki GDP per kapita tertinggi ke-11 di dunia dan memiliki ekonomi terbesar ke-13. Untuk mempertahankan kinerja ini

membutuhkan keterlibatan internasional yang kuat.

Negosiasi RCEP dibentuk oleh pemimpin dari 16 negara yang berpartisipasi dalam *East Asia Summit* pada tanggal 20 November 2012. Mereka mengumumkan bahwa RCEP akan menjadi “perjanjian kemitraan ekonomi yang modern, komprehensif, berkualitas tinggi dan saling menguntungkan dengan membangun perdagangan terbuka dan lingkungan investasi di daerah untuk memfasilitasi perluasan perdagangan regional dan investasi dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi global dan pembangunan.³ Bergabung dalam *Regional Economic Comprehensive Partnership* juga merupakan salah satu upaya Australia dalam memperdalam kerja sama internasional dan meningkatkan integrasi ekonominya. RCEP akan memiliki potensi untuk memberikan peluang signifikan bagi bisnis dan konsumen Australia. RCEP akan mencakup 9 dari 13 mitra dagang Australia, dan secara kolektif negara-negara peserta RCEP akan menggabungkan GDP sebesar US \$ 23,8 triliun (2016). Negara-negara ini menyumbang hampir 60 persen dari total perdagangan dua arah Australia, dan lebih dari 65 persen dari ekspor.

Kerangka Teori

Dalam dinamika diskursus liberalisme hubungan internasional, fokus pembahasan berawal dari adanya tujuan pencapaian perdamaian antara sebuah negara dan negara lainnya melalui kerja

³ Aulia, Randi Isan. Februari 2017. Kepentingan Republik Rakyat Tiongkok dalam pembentukan

Regional comprehensive Economic Partnership(RCEP). Pekanbaru: Jom FISIP Volume 4 No 1.

sama yang menguntungkan (mutual benefit). Dengan kata lain, liberalisme melihat kerjasama sebagai sebuah instrumen pencipta perdamaian yang efektif dan efisien. Ideologi yang mendasari ilmu ekonomi liberal memiliki asumsi khas tentang hakekat manusia. Yaitu manusia dipandang semata-mata sebagai “makhluk ekonomi” yang tentu saja selalu ingin memaksimalkan keuntungan. Kaum liberal percaya bahwa dengan saling berinteraksinya Negara-negara melalui perdagangan internasional, konflik bisa dihindarkan. Bahkan bisa membawa keuntungan bersama sehingga kesejahteraan mereka akan meningkat. Sementara itu ekonomi liberal memandang peran negara adalah untuk melindungi hak milik dan menciptakan lingkungan yang mendukung bekerjanya pasar.

Tingkat Analisa

Menurut Waltz, level analisis merupakan faktor-faktor penjelas, sedangkan menurut Singer, level analisis merupakan target analisis dimana peneliti dapat memperoleh gambaran (*description*), penjelasan (*explanation*) dan perkiraan (*prediction*) yang akurat tentang perilaku negara. Dari definisi-definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa level analisis adalah alat yang dapat digunakan peneliti untuk menemukan variabel mana yang sangat menentukan tindakan aktor.⁴ Penelitian ini menggunakan tingkat penelitian Negara-bangsa (*nation state*). Level analisis negara bangsa membahas mengenai negara sebagai pengendali utama dalam pelaksanaan politik luar negeri. Untuk itu negara melakukan kerjasama dengan

negara lain dengan mengatasnamakan kepentingan nasional dan kesejahteraan nasional.

Dalam tingkat negara bangsa dianggap bahwa semua pembuat keputusan dimanapun berada, pada dasarnya berperilaku sama apabila menghadapi situasi yang sama. Analisa ditekankan pada unit Negara bangsa. Karna hubungan internasional pada dasarnya didominasi oleh perilaku Negara bangsa. Penelitian ini memfokuskan pada perilaku negara bangsa yang dinilai masih relevan dengan fenomena hubungan internasional yang walaupun terdapat perkembangan perilaku (aktor) dalam hubungan internasional. Level analisis Negara-bangsa dijadikan penentu utama dalam penentuan tindakan yang didasarkan pada kepentingan nasional masing – masing negara. Negara merupakan aktor dalam hubungan internasional yang memiliki kepentingan nasional (*national interest*) dan memiliki otoritas sentral yang mengatur kegiatan – kegiatan negara.⁵ Dalam hal ini dapat ditelaah bahwa Australia dalam mengambil keputusan, terlebih dahulu mempertimbangkan keberadaan kapasitas negaranya, termasuk juga memperkirakan hal – hal yang termasuk kedalam ancaman apabila mengambil keputusan tersebut dan melihat peluang – peluang yang ada.

Teori

Menurut *Miroslav Nincic*, terdapat tiga asumsi dasar dalam mendefinisikan kepentingan nasional. Pertama, kepentingan itu harus bersifat vital sehingga pencapaiannya menjadi prioritas utama pemerintah dan masyarakat. Kedua,

⁴ Yesi Olivia.” “*Level Analisis Sistem dan Teori Hubungan Internasional*”, dalam jurnal Transnasional, vol 5 No 1. Juli 2013 h. 892.

⁵ Paul R Viotti dan Mark V Kauppi, *International Relations and War Politics Security, Economy Identity*, New Jersey : Prentice 162-163

kepentingan itu harus berkaitan dengan lingkungan internasional atau pencapaian kepentingan nasional dipengaruhi oleh lingkungan internasional. Ketiga, kepentingan nasional harus melampaui kepentingan yang bersifat partikularistik dari individu, kelompok atau lembaga pemerintahan sehingga menjadi kepedulian masyarakat secara keseluruhan.⁶ Dalam analisis kepentingan nasional, peran aktor dalam hal ini negara, akan mengejar apapun yang dapat membentuk dan mempertahankan, pengendalian suatu negara atas negara lain. Pengendalian tersebut berhubungan dengan kekuasaan yang tercipta melalui teknik-teknik paksaan ataupun kerjasama.

Dalam hubungan internasional, dimensi kepentingan nasional dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian pertama, kepentingan ekonomi, kedua, kepentingan pertahanan dan keamanan, ketiga, kepentingan internasional dan terakhir, kepentingan ideologi. Keempat dimensi ini merupakan aspek-aspek utama yang memengaruhi dan memotivasi sebuah negara dalam mengusahakan kepentingan nasional negara masing-masing dalam hubungan internasional. Seturut halnya dengan *regional comprehensive economic partnership* sebagai suatu output akan kebutuhan atas kerjasama yang tentunya mengandung kesamaan konsep dengan apa yang telah dipaparkan sebelumnya yakni dimana kerjasama sangat dibutuhkan untuk mencapai national interest. Yang mana

dalam hal ini *regional comprehensive economic partnership* dibentuk bertujuan sebagai wadah untuk mencapai kepentingan nasional politik-ekonomi negara negara anggotanya.⁷

II ISI

Sejarah RCEP

Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) merupakan perjanjian perdagangan bebas antara 10 negara anggota *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) dengan enam negara mitra perdagangan bebas ASEAN yaitu Tiongkok, India, Jepang, Australia, Selandia Baru dan Korea Selatan . RCEP pertama kali diluncurkan oleh Pemimpin ASEAN dan mitra perdagangan bebas ASEAN pada *East Asia Summit* (EAS) di Phnom Penh, Kamboja pada November 2012 . RCEP bertujuan untuk mengurangi hambatan tarif dan non-tarif secara substansial pada semua perdagangan barang untuk membangun kawasan perdagangan bebas di antara para pihak. Negosiasi tarif akan dilakukan secara komprehensif, perundingan yang dilakukan bertujuan untuk mencapai tingkat liberalisasi tarif yang tinggi, dengan membangun tingkat liberalisasi yang ada di antara negara-negara peserta RCEP dan melalui penghapusan tarif dengan persentase yang tinggi dari kedua tarif dan nilai perdagangan.⁸

RCEP digagas untuk memperluas integrasi regional dan membantu menyelesaikan persoalan-persoalan yang

⁶ Dikutip oleh Alexius Jemadu dalam bukunya yang berjudul Politik Global dalam Teori dan Praktik dari Miroslav Nincic, *Democracy and Foreign Policy :The Falacy of Political Realism*

⁷ Tersedia di http://ahalla-ts-fisip12.web.unair.ac.id/artikel_detail-70107-umum-Peranan%20Kepentingan%20Nasional%20dalam%20Hubungan%20Internasional.html .

⁸ Ministry of Foreign Affairs and Trade of Australia: Guiding Principles and Objectives for Negotiating the Regional Comprehensive Economic Partnership. Tersedia di <http://dfat.gov.au/trade/agreements/rcep/Document/s/guiding-principles-rcep.pdf>. Diakses 17 November 2017

muncul sebagai akibat dari timpang tindih perjanjian perdagangan bilateral dan regional antar ASEAN dengan kawasan Asia Pasifik. RCEP ditujukan untuk memberikan keuntungan yang nyata bagi negara-negara anggota melalui peningkatan akses pasar, fasilitasi perdagangan yang lebih koheren dan menggagas aturan-aturan dan kerja sama yang memungkinkan terwujudnya interaksi ekonomi yang saling menguntungkan. Inti dari agenda perundingan RCEP mencakup dalam bidang perdagangan barang, jasa, investasi, kerja sama ekonomi dan teknik, kerja sama dibidang persaingan usaha, hak kekayaan intelektual, dan penyelesaian sengketa⁹

Ruang Lingkup RCEP

Pembentukan RCEP dilandasi konsep filosofis dan strategik melalui konsolidasi kerja sama FTA ASEAN dengan Negara Mitra FTA (RRT, Jepang, Korea, Australia & Selandia Baru, dan India), yang diyakini akan memberikan potensi ekonomi dari integrasi pasar dengan jumlah sebesar 3,5 miliar jiwa (45% penduduk dunia) dan kawasan ekonomi dengan Produk Domestik Bruto (PDB) senilai USD 20 triliun (28% PDB dunia). Mayoritas negara peserta RCEP termasuk India, RRT, ASEAN (kecuali Singapura dan Brunei) merupakan negara berkembang yang dominasinya akan terus meningkat dalam perekonomian dunia yang dimana tentu akan meningkatkan persentase potensi RCEP seiring berjalannya waktu.



Sumber : The Asean Post. Who is actually leading the RCEP,2013.¹⁰

Guiding Principles RCEP

Guiding Principles RCEP merupakan prinsip – prinsip dasar yang dianut oleh negara – negara anggota. Negosiasi REP akan dipandu oleh prinsip – prinsip sebagai berikut :

- I. RCEP akan konsisten dengan WTO, termasuk GATT Pasal XXIV dan GATS Pasal V
- II. RCEP akan memiliki keterlibatan yang lebih luas dan lebih dalam dengan perbaikan yang signifikan dari ASEAN+1 FTA, sementara mengakui keadaan individu yang beragam dari negara – negara peserta
- III. RCEP akan mencakup ketentuan – ketentuan untuk memfasilitasi perdagangan dan investasi, dan untuk meningkatkan transparansi dalam hubungan perdagangan dan investasi antar negara – negara peserta dalam rantai pasokan global dan regional

⁹ Building the ASEAN Community Regional Comprehensive Economic Partnership A Coherent Approach towards Economic Integration, <http://www.asean.org/storage/images/2015/October/outreachdocument/Edited%20RCEP.pdf> diakses pada 15 Novembe 2017

¹⁰ Angaindrankumar Gnanasagarar.The ASEAN Post; Who is actually leading the RCEP.2017

- IV. Dengan mempertimbangkan berbagai tingkat pembangunan negara – negara peserta, RCEP akan mencakup bentuk yang tepat dari fleksibilitas termasuk ketentuan untuk perlakuan khusus dan berbeda, ditambah fleksibilitas untuk negara anggota ASEAN yang sedang berkembang, yang konsisten dengan ASEAN+1 FTA yang ada
- V. ASEAN+1 dan FTA bilateral/plurilateral di antara negara – negara peserta akan terus ada dan tidak ada ketentuan dalam perjanjian RCEP akan mengurangi syarat dan kondisi FTA bilateral/plurilateral di antara negara – negara peserta.
- VI. Setiap mitra FTA ASEAN yang tidak berpartisipasi dari awal negosiasi RCEP akan diizinkan untuk bergabung dengan negosiasi, tunduk pada syarat dan ketentuan yang akan disepakati dengan semua negara peserta lainnya. Perjanjian RCEP juga akan memiliki akses klausul terbuka untuk memungkinkan partisipasi dari setiap FTA ASEAN yang tidak berpartisipasi dalam negosiasi RCEP dan setiap mitra ekonomi eksternal lainnya setelah selesainya negosiasi RCEP.
- VII. Ketentuan untuk bantuan teknis dan peningkatan kapasitas dapat disediakan, dibangun di atas ASEAN+1 FTA, untuk pengembangan negara – negara kurang berkembang yang berpartisipasi penuh dalam negosiasi, melaksanakan

kewajibannya dibawah RCEP dan menikmati manfaat dari RCEP tersebut.

- VIII. Negosiasi perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi dan lainnya akan dilakukan secara paralel untuk memastikan hasil yang komprehensif dan seimbang.¹¹

Cakupan RCEP

1. Perdagangan Barang

RCEP akan secara bertahap menghilangkan hambatan tarif dan non-tarif pada hakekatnya pada semua perdagangan barang dalam rangka membangun kawasan perdagangan bebas di antara pihak negosiasi tarif akan dilakukan secara komprehensif. Negosiasi harus bertujuan untuk mencapai liberalisasi tarif dan tingkat tinggi, karna dibangun di atas tingkat liberalisasi yang ada di antara negara – negara peserta RCEP dan melalui penghapusan tarif pada persentase yang tinggi dari kedua pos tarif dan nilai perdagangan.

2. Perdagangan Jasa

RCEP akan berjalan komprehensif, berkualitas tinggi dan secara substansial menghilangkan batasan dan/tindakan diskriminatif terhadap perdagangan jasa antara negara – negara RCEP

3. Investasi

RCEP akan bertujuan untuk menciptakan lingkungan investasi yang bebas dan kompetitif di wilayah tersebut. Negosiasi dibawah RCEP akan mencakup empat pilar, promosi, perlindungan, fasilitasi dan liberalisasi.

¹¹ *Guiding Principles and Objectives for Negotiation RCEP.*

4. Kerjasama Ekonomi dan Teknis

Kerjasama ekonomi dan teknis dibawah RCEP akan bertujuan mempersempit kesenjangan pembangunan antar pihak dan saling menguntungkan dari pelaksanaan perjanjian RCEP. Ketentuan kerjasama ekonomi dan teknis dalam RCEP akan membangun pengaturan kerjasama ekonomi yang ada antara ASEAN dan mitra FTA ASEAN yang berpartisipasi dalam RCEP tersebut.

5. Kekayaan Intelektual

Teks mengenai kekayaan intelektual di RCEP akan bertujuan mengurangi hambatan terkait IP perdagangan dan Investas dengan mempromosikan integrasi ekonomi dan kerjasama dalam pemanfaatan, perlindungan dan penegakan hak kekayaan intelektual.

6. Kompetisi

Ketentuan alam kompetisi akan me bentuk dasar untuk pihak bekerjasama dalam kompetisi. Efisiensi dan ekonomi, kesejahteraan konsumen dan pembatasan praktek anti-kompetitif sambil meyadari perbdaan yang signifikan dalam kapasitas dan rezim nasional negara – negara yang berpartisipasi dalam RCEP didaerah kompetisi.

7. Penyelesaian Sengketa

RCEP akan mencakup mekanisme penyelesaian sengketa yang akan memberikan prose yang efektif, efisien dan transparan untuk konsultasi dan penyelesaian sengketa.

8. Isu – isu lainnya

Negosiasi RCEP juga akan mempertimbangkan isu – isu lain yang terdapat pada FTA antara negara – negara anggota pserta RCEP, yang dapat diidentifikasi dan disepakati bersama dalam proses negosiasi, dan meerhitungkan isu – isu yang akan muncul yang relean engan realita bisnis di daerah tersebut.¹²

Potensi RCEP

Perjanjian RCEP akan mempertemukan tiga dari empat besar dan empat dari delapan ekonomi terbesar yang diukur secara global dalam persyaratan keseimbangan kemampuan belanja (*purchasing power parity*). Ini akan menjadi kesepakatan dagang pertama di luar WTO yang mempertemukan China dan Jepang, China dan India dan Jepang dan Korea Selatan. Apalagi semenjak penarikan diri oleh AS dari Kemitraan Trans-Pasifik (TPP) pada bulan Januari 2017, hal ini otomatis menyebabkan ukuran komparatif RCEP dan statusnya telah meningkat secara signifikan.

Tabel 1: 2016 GDP (in US\$ Trillion)

	GDP	GDP (PPP)
RCEP	23,758	45,855
US	18,569	18,569
EU	16,397	20,270
TPP-11	10,152	13,242
World	75,544	120,142

Source : World Bank, World Development Indicators¹³

Terhitung pada tahun 2016 total GDP RCEP mencapai US\$ 23,758 trilyun

¹² Ibid,.

¹³ World Bank, World Development Indicators. Diakses pada 13 Des 2017.

merupakan angka yang fantastis mengingat yang dimana jumlah tersebut merupakan 30% total GDP dunia dengan US\$ 75,544 triliun yaitu hampir setengah populasi dunia, hal tersebut juga membuat RCEP menjadi pakta dagang dengan jumlah GDP terbesar bila dibandingkan dengan TPP (*Trans Pacific Partnership*) yang juga merupakan pakta dagang yang pada awalnya digadag gadang merupakan mega *free trade agreement*. Tidak berhenti disitu, bahkan jika dibandingkan dengan negara super power seperti USA yang pada tahun 2016 mempunyai total GDP US\$ 18,569 triliun dan Uni Eropa dengan US\$ 16,397 triliun dimana angka tersebut cukup terpaut jauh dari total GDP yang akan dihasilkan oleh negara – negara anggota RCEP. Selain itu, total populasi dari seluruh negara yang terlibat dalam RCEP akan mencatat jumlah 3,5 milyar jiwa atau lebih dari 45% total populasi dunia pada tahun 2014. Sedangkan total perdagangan antar negara – negara yang tergabung dalam RCEP tak kurang dari US\$ 10.8 triliun atau lebih dari 28% perdagangan global. Disisi lain, investasi dengan skema *Foreign Direct Investment* (FDI) yang mengalir menuju negara anggota RCEP tercatat sebesar US\$ 366.3 miliar atau lebih dari 29% FDI global. Berdasarkan point point tersebut tentu saja pembentukan RCEP diharapkan menjadi kawasan regional sebagai sentral perdagangan dunia.

Jika RCEP berhasil diratifikasi dan di implementasikan, dampak liberalisasi dari hal tersebut akan sangat jelas terasa mengingat besarnya potensi yang dimiliki oleh negara – negara yang terlibat dalam RCEP. Diantaranya RCEP akan;

- Jika selesai dan diratifikasi, Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)

akan menjadi pakta perdagangan dan investasi terbesar yang dicapai sejak akhir Putaran Uruguay GATT.

- Ini akan menjadi jalur yang paling inklusif menuju tujuan APEC dari Kawasan Perdagangan Bebas Asia Pasifik
- Memberikan tandingan positif yang kuat untuk mengulur-ulur Putaran Doha WTO yang dimulai pada tahun 2001, penarikan AS dari TPP (AS menyumbang 65% dari PDB TPP-12 kolektif) yang berarti kematian Trans-Atlantik yang nyata juga Kemitraan Perdagangan dan Investasi
- Melambangkan bahwa Asia masih antusias berdagang dan terbuka untuk bisnis, terutama ditengah sentimen anti globalisasi di Barat. Ini akan menandai terus pergeseran pusat gravitasi ekonomi global dari Atlantik dan Pasifik ke Asia Timur
- Menjadi contoh terpenting dari Sentralitas ASEAN dan manfaatnya bagi negara-negara anggota ASEAN. RCEP adalah ASEAN-disusun dan diprakarsai dan dipimpin oleh ASEAN. Perjanjian RCEP akan menunjukkan bagaimana ASEAN dapat secara positif mengelola hubungan antara negara-negara anggota ASEAN dan kekuatan ekstra-regional yang besar dan memberikan dasar terbaik untuk integrasi dan

kerjasama regional Asia-Pasifik yang lebih luas.¹⁴

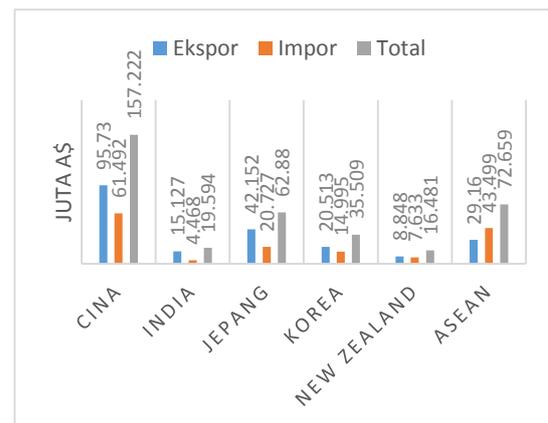
Australia dalam Regional Comprehensive Economic Partnership

Australia merupakan salah satu negara berbasis sistem demokrasi liberal yang memiliki kekuatan ekonomi yang cukup besar di dunia. Dengan statusnya tersebut, Australia dipertimbangkan sebagai aktor yang memiliki peran yang signifikan dalam tatanan internasional. Dalam sektor politik sendiri, Australia menjadi salah satu model negara demokrasi yang menjalankan aktivitas pemerintahan sesuai dengan amanat liberalisme. Sistem yang diaplikasikan Australia ini membuat Australia menjalin relasi yang baik dengan negara-negara superpower dunia yang memiliki sistem yang sama, yakni Amerika Serikat, yang hingga kini masih menjadi aliansi prioritas Australia. Sementara, dalam bidang ekonomi, Australia telah maju menjadi negara maju yang berorientasi pada ekspor, terutama dalam bidang energi. Australia juga terlibat secara aktif dalam perdagangan bebas dunia dengan bergabung dengan sejumlah kesepakatan perdagangan bebas seperti dengan ASEAN, dan sejumlah negara yang memiliki kekuatan ekonomi seperti Tiongkok dan India.

Dikenal sebagai salah satu produsen sektor pertanian, pertambangan dan energi yang hebat, Australia memiliki salah satu ekonomi paling terbuka dan beragam di dunia, dengan tenaga kerja berpendidikan tinggi dan sektor jasa yang luas. Perekonomian Australia pun dianggap

salah satu yang terkuat, paling stabil dan beragam di dunia. Pada tahun 2015, Australia memasuki tahun ke 25 pertumbuhan ekonomi tahunan yang tidak terputus, rata-rata 3,3 persen per tahun.¹⁵ Sektor jasa merupakan bagian terbesar dari ekonomi Australia, yang mencakup sekitar 60 persen produk domestik bruto dan empat dari lima pekerjaan. Australia adalah pusat keuangan yang penting dan berkembang, dengan sektor jasa keuangan yang canggih dan peraturan yang kuat. Australia merupakan pemimpin global di lima signifikan dan beragam sektor: Agribisnis, Pendidikan, Pariwisata, Pertambangan dan Manajemen Kekayaan.

Grafik. 1 Ekspor Impor Perdagangan



Barang Australia di Negara – Negara RCEP 2016-2017

Sumber: Data olahan, 2018

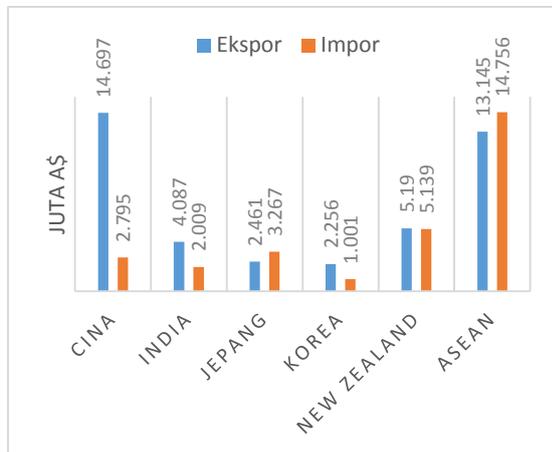
Dari seluruh negara anggota RCEP, terlihat pada sektor trade in goods Cina menjadi mitra terbesar bagi Australia dengan total aktivitas ekspor dan impor mencapai A\$95,73 juta, terbesar kedua adalah ASEAN dengan total A\$72,659 juta diikuti oleh Jepang yang berjumlah A\$62,88 juta selanjutnya Korea dengan A\$35,509 dan diakhiri tipis oleh India dan New Zealand

¹⁴ ISEAS Yusuf Ishak Institute. 16 Oktober 2017. RCEP's Strategic Opportunity. Issues :2017, No. 76

¹⁵ Ministry of Foreign Affairs and Trade of Australia. <http://dfat.gov.au/about-australia/land-its-people/Pages/economy.aspx>

denga total A\$19,594 juta dan A\$16,481 juta.

Grafik. 2 Ekspor Impor Sektor Jasa Australia di Negara – Negara RCEP 2016 – 2017



Sumber: Data olahan, 2018

Pada sektor jasa, ASEAN menjadi mitra dengan tingkat baik ekspor maupun import tertinggi diantara negara – negara lainnya. Sementara di Cina terdapat nominal yang tinggi pada ekspor jasa sejumlah A\$14,697 juta dan jumlah impor yang kecil jika dibandingkan dengan ekspor ke negeri tersebut sebesar A\$2,795 juta saja. Selanjutnya terdapat New Zealand dengan jumlah yang seimbang diantara total ekspor dan impor jasa yakni A\$5,19 juta dan A\$5,139 juta. Pada tiga negara tersisa, yakni India, Jepang dan Korea terdapat jumlah total baik ekspor maupun impor yang signifikan tidak berbeda, dengan jumlah ekspor diantara A\$2,256 juta – A\$5,190 juta saja dan impor sekitar A\$1,001 juta – A\$3,267 juta.

Dua grafik diatas jelas menunjukkan peluang yang sangat besar

bagi peningkatan ekonomi Australia terhadap negara – negara anggota RCEP kedepannya mengingat pesatnya perkembangan interaksi ekonomi di seluruh dunia dewasa ini.

Kepentingan Australia dalam Pembentukan RCEP

Peralihan preferensi aliansi dagang dari yang multilateral menuju bilateral menguat mulai tahun 2000an hingga kini. negara-negara berlomba-lomba membentuk *free trade agreement* (FTA) dengan sistem bilateral yang memiliki tata aturannya sendiri yang saling silang-menyalang dengan kawan-kawan dagangnya. Berbeda dengan sistem multilateral yang tercermin dalam institusi WTO ketika semua anggotanya mendapatkan perlakuan yang sama, yang berasal dari regulasi yang sama pula. Untuk menjembatani pro-kontra di antara dua bentuk kerja sama dagang multilateral dan bilateral, muncul FTA alternatif yang hibrid berwujud *mega-regional* FTA. Diantaranya adalah *Trans Pasific Partnership* (TPP) dan *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) yang sedang menjadi bahasan utama. TPP disebut-sebut sebagai solusi bergaya Amerika, beranggotakan 12 negara yang terpusat pada Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan negara-negara ASEAN, kecuali Tiongkok. TPP dianggap mampu memperbaiki persoalan kualitas di balik FTA yang sifatnya bilateral.¹⁶ Mengingat kesepakatan TPP tidak akan pernah berlaku karena lanskap politik yang tidak pasti di AS, Australia dan enam negara lainnya (Selandia Baru, Jepang, Singapura, Malaysia, Brunei dan Vietnam)

¹⁶ Pergeseran Arsitektur Sistem Perdagangan dikawasan Asia Pasifik. 21 Maret 2017. Departemen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada.

Tersedia di <http://hi.fisipol.ugm.ac.id/berita/pergeseran-arsitektur-sistem-perdagangan-di-kawasan-asia-pasifik/>.

yang merupakan anggota TPP dan RCEP adalah memfokuskan kebijakan perdagangan internasional mereka pada kemitraan ekonomi yang terakhir dikarenakan prospek TPP yang semakin tidak menentu, RCEP menjadi opsi strategis bagi pengembangan mega regionalisme ekonomi Asia Pasifik.

Pada aspek lain bagi Australia, RCEP ditujukan untuk membangun FTA yang ada di Australia yang melengkapi partisipasi Australia dalam FTA bilateral dengan negara lain dan Perjanjian Kemitraan Trans-Pasifik (TPP). Ke 16 negara peserta RCEP menyumbang hampir 30 persen dari PDB global, setengah dari populasi dunia, dan lebih dari seperempat ekspor dunia. Namun bukan berarti tidak terdapat tantangan dalam RCEP, dalam proses negoisasinya, RCEP menemukan kesulitan oleh kepentingan yang bersaing dan prioritas yang saling bertentangan yang lahir dari berbagai tingkat perkembangan ekonomi dan politik antar negara. Oleh karena itu sangat penting bahwa Australia menggunakan kebijaksanaan diplomasi untuk mengelola diskusi dan memposisikan dirinya sebagai pemangku kepentingan utama dalam negosiasi. Pendekatan Australia untuk mengatasi hambatan apa pun adalah untuk mendorong lingkungan yang lebih terbuka dan transparan bagi investor Australia di ekonomi regional utama seperti China, India dan Indonesia, dan untuk mendorong negara-negara untuk memprioritaskan liberalisasi investasi dua arah, dan mendapatkan akses yang lebih baik bagi investor Australia di pasar regional utama Australia seperti

manufaktur, pertambangan, pertanian, perikanan dan kehutanan.

Dalam hal Ekonomi, kehadiran globalisasi telah membuat investasi asing semakin penting posisinya. Dengan perdagangan input dan output lintas batas yang terjadi di dalam jaringan RCEP, hal ini menyumbang sekitar 80 persen perdagangan global. Perekonomian dengan proporsi FDI yang tinggi cenderung memiliki partisipasi lebih besar dalam rantai nilai global. Investasi asing, perdagangan dua arah dan pertumbuhan ekonomi saling terkait - masing-masing mendukung dan memfasilitasi pihak lain. Investasi asing di Australia mendukung bisnis Australia, termasuk eksportir dengan memberi mereka akses terhadap modal dan keahlian, teknologi dan jaringan mitra luar negeri. Membebaskan lingkungan investasi antara negara-negara RCEP mendukung pertumbuhan ekonomi dan hubungan perdagangan.

Bagi Australia Investasi asing merupakan aspek penting yang mana dapat mendorong ekspor, pertumbuhan dan lapangan kerja. Warga Australia adalah investor besar di luar negeri, peringkat ke-17 secara global untuk investasi langsung di luar negeri (AUD 542,6 miliar pada tahun 2015). Saham investasi asing langsung di Australia bernilai AUD 735 miliar pada tahun 2015.¹⁷ Sembilan dari 13 mitra dagang Australia (China, Jepang, ROK, Singapura, Selandia Baru, Thailand, Malaysia, India dan Indonesia) berpartisipasi dalam negosiasi RCEP. Hal tersebut akan menimbulkan permintaan untuk banyak ekspor Australia yang akan

¹⁷ Department of Foreign Affairs and Trade of Australia tersedia di <<http://dfat.gov.au/trade/agreements/rcep/Pages>

<rcep-discussion-paper-on-investment-may-2017.aspx>

didorong oleh kelas menengah yang muncul di wilayah Indo-Pasifik. Terlebih lagi dalam investasi asing, perdagangan dua arah dan pertumbuhan ekonomi merupakan hal yang saling terkait, masing-masing mendukung dan memfasilitasi pihak lain. Investasi asing di Australia mendukung bisnis Australia, termasuk eksportir dengan memberi mereka akses terhadap modal dan keahlian, teknologi dan jaringan mitra luar negeri. Membebaskan lingkungan investasi antara negara-negara RCEP mendukung pertumbuhan ekonomi dan hubungan perdagangan.

III. KESIMPULAN

Setelah beberapa kali negosiasi dan pergeseran target penyelesaian negosiasi, pada awalnya RCEP dijadwalkan akan selesai pada akhir 2016 dan mulai dijalankan pada tahun 2017. Tetapi target ini tidak bisa dicapai dikarenakan oleh keanekaragaman serta kepentingan yang berbeda dari setiap negara anggota mempengaruhi negosiasi RCEP. Selain itu tingkat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi dari tiap negara RCEP membutuhkan waktu yang lebih dari target yang telah ditetapkan. .

Australia terlebih dahulu memiliki kerjasama bilateral dengan negara – negara anggota RCEP, dengan Cina, terdapat *China-Australia Free Trade Agreement* (ChAFTA), Jepang *Japan-Australia Economic Partnership Agreement* (JAPEPA), Korea Selatan *Korea-Australia Free Trade Agreement* (KAFTA), Selandia Baru *Australia – New Zealand Closer Economic Relations Trade Agreement* (ANZCERTA), kerja sama multilateral dengan ASEAN dan Selandia Baru *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area* (AANZFTA) dan terdapat kerja sama

dengan India namun masih dalam proses negosiasi. Hal ini yang mendasari Australia secara politik memerlukan RCEP untuk dapat mengintegrasikan kerjasama – kerjasama tersebut dalam satu kerja sama yang komperensif sehingga hambatan – hambatan yang terdapat dalam masing – masing kerjasama dapat di minimalisir guna memaksimalkan peluang bagi Australia.

Dalam faktor ekonomi, RCEP dianggap berpotensi meningkatkan peluang bisnis di banyak aspek di Australia. Mengingat ini adalah kesepakatan komprehensif, meliputi perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi, kerjasama ekonomi dan teknis, kekayaan intelektual, persaingan, *e-commerce* (perdagangan digital), penyelesaian sengketa / masalah hukum dan kelembagaan.

Tentunya juga sebagai salah satu negara degan perekonomian terbesar didunia, Australia sangat memahami potensi pentingnya terlibat dalam negosiasi regional kepentingan geo-politik serta pentingnya inovasi dan pembuatan peraturan yang dinegosiasikan ke RCEP. Australia sadar bahwa Australia harus terus mempertaruhkan posisi terbaiknya sekarang dan ke masa depan untuk melindungi peluang ekspor dan mempengaruhi perundingan WTO di masa depan. Satu-satunya cara untuk mencapai ini adalah dengan melibatkan diri dalam semua jenis negosiasi perdagangan karena otomatis pula hal itu menjadikan Australia mendapatkan keuntungan secara strategis dan ekonomis darinya. Dan bergabung dalam pembentukan *Regional Comprehensive Economic Partnership* merupakan langkah yang tepat bagi Australia untuk mencapai kepentingan –

kepentingan yang sejalan dengan prinsip – prinsip dibentuknya RCEP

REFERENSI

Aulia, Randi Isan. Februari 2017. Kepentingan Republik Rakyat Tiongkok dalam pembentukan *Regional Comprehensive Economic Partnership(RCEP)*. Pekanbaru: Jom FISIP Volume 4 No 1.

ISEAS Yusuf Ishak Institute. 16 Oktober 2017. *RCEP's Strategic Opportunity. Issues* :2017, No. 76

Paul R Viotti dan Mark V Kauppi, *International Relations and War Politics Security, Economy Identity, New Jersey* : Prentice 162-163

Urata, Sujiro. 2002. *Globalization and the Growth in Free Trade Agreements. Asia-Pacific Review*. Vol.9, No.1 (hlm 20-21).

Jefrey D. Wilson. 2015. *Mega-Regional Trade Deals in the Asia-Pacific: Choosing Between the TPP and RCEP. Journal of Contemporary Asia*. Vol. 45, No. 2, Hlm 345.

Wanandi, Jusuf. 2006. *Global,Regional and National:Strategic Issues and Linkages*, Yogyakarta: CSIS. Hlm 128.

Xiao, Yifei. 2015. *Competitive Mega-regional Trade Agreements: Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) vs. Trans-Pasific Partnership (TPP)*. *CUREJ-College Undergraduate Research Electronic Journal*. Hlm 6.

Yesi Olivia.“Level Analisis Sistem dan Teori Hubungan Internasional”, dalam

jurnal Transnasional, vol 5 No 1. Juli 2013 h. 892.

Dikutip oleh Alexius Jemadu dalam bukunya yang berjudul Politik Global dalam Teori dan Praktik dari *Miroslav Nincic, Democracy and Foreign Policy :The Falacy of Political Realism*. Alexius Jemadu. 2008. Politik Global dalam Teori dan Praktik. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal. 67- 69

Ministry of Trade and Industry Singapore, Press Release Factsheet on The Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). 2012. Hal 1

Department of Foreign Affairs and Trade of Australia

<<http://dfat.gov.au/trade/agreements/rcep/Pages/rcep-discussion-paper-on-investment-may-2017.aspx>>

Department of Foreign Affairs and Trade of Australia.

<http://dfat.gov.au/trade/agreements/rcep/business/Pages/for-business.aspx>.

Guiding Principles and Objectives for Negotiation RCEP. http://ahalla-ts-fisip12.web.unair.ac.id/artikel_detail-70107-umum-Peranan%20Kepentingan%20Nasional%20dalam%20Hubungan%20Internasional.html

Ministry of Foreign Affairs and Trade of Australia. <http://dfat.gov.au/about-australia/land-itspeople/Pages/economy.aspx>

Pergeseran Arsitektur Sistem Perdagangan
dikawasan Asia Pasifik. 21 Maret 2017.
Departemen Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Gadjah Mada.
<http://hi.fisipol.ugm.ac.id/berita/pergeseran-arsitektur-sistem-perdagangan-dikawasan-asia-pasifik/>.

*The Australia Malaysia Bussiness Council,
Regional Comprehensive Economic
Partnership. <http://www.ambc.org.au/wp-content/uploads/2013/04/RCEP-Summary-Document.pdf>*

*World Bank, World Development
Indicators.*